BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Sistem informasi mungkin sudah tidak asing bagi kita akhir-akhir ini di mana-mana istilah ini sudah sedemikian sering digunakan mulai dari sekolah, pemerintah daerah dan pusat, universitas, lingkungan bisnis, dan lain-lain. Sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis data, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik (Turban, Mc Lean, Wetherbe, 1999). Sistem Informasi Akuntansi sebagai sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasikan data akuntansi menjadi informasi.

Paket Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 dan sebagai wujud adanya reformasi di bidang keuangan telah mengamanatkan bahwa sistem akuntansi dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah harus berdasarkan basis akrual. Pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual ini harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnya 5 tahun sejak Undang-Undang tentang keuangan Negara pertama kali disahkan atau lebih tepatnya tahun 2008 sistem aplikasi pemerintah sudah berbasis akrual. Sebagai pedoman dalam pengimplementasian sistem tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Selama 5 tahun tersebut sistem akuntansi akrual belum dapat diimplementasikan dan sebagai masa transisi sistem yang digunakan adalah sistem kas menuju akrual (*Cash Basis toward Accrual*). Pada kenyatannya setelah

tahun 2008 masih banyak yang harus dilakukan persiapan-persiapan dan penyempurnaan-penyempurnaan sehingga terjadi penundaan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hal ini telah disepakati antara pemerintah dengan DPR yang dituangkan dalam UU pertanggungjawaban APBN dan diterbitkannya PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sebagai pengganti PP Nomor 24 tahun 2005.

Persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntansi akrual tersebut diantaranya memberikan training-training (sebanyak 24.000) sebagai pelatihan awal, penyiapan teknologi informasi, dan persiapan dana yang dibutuhkan. Untuk persiapan penyelenggaraan training, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan workshop implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual dan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Untuk pelaksanaan workshop di daerah, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan juga bekerja sama dengan Balai Diklat Keuangan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Terkait dengan penyiapan teknologi informasi telah dihasilkan sistem aplikasi SPAN yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2013, dan sistem aplikasi SAKTI yang rencananya akan dilakukan piloting sistem pada tahun 2014. Sampai dengan tahun 2014 sistem aplikasi SAKTI masih terdapat penyempurnaan-penyempurnaan sehingga tidak dimungkinkan dapat digunakan untuk tahun 2015, sedangkan pada tahun 2015 seluruh satker sudah diwajibkan melaksanakan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan yang berbasis akrual. Sebagai gantinya pemerintah

yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengembangkan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Sistem ini merupakan modifikasi dari aplikasi SAKPA yang selama ini telah familiar digunakan oleh seluruh satker yang ada sehingga para satker tidak akan mengalami kesulitan untuk mempelajari aplikasi SAIBA. Modifikasi tersebut meliputi saldo awal, pencatatan transaksi, dan penyesuaian-penyesuaian. Dalam menganalisis transaksi-transaksi yang semula dicatat berdasarkan basis kas pada saat terjadinya transaksi tersebut akan disesuaikan pada akhir periode ke dalam sistem basis akrual.

Menurut Tedy Fatkhuri sebagai bagian keuangan pada PSTA LAPAN Bandung. Dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi (BAR) masih sering tertunda. Menurutnya hal ini karena belum stabilnya Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Dalam penginputan data di SAIBA masih terjadi masalah tidak terbacanya di aplikasi SPAN Kemenkeu yang akhirnya terjadi ketidaksesuaian. Selain itu juga masih adanya akun persediaan dan asset yang belum diregister. Hal ini dikarenakan masih tidak terdeteksi atau tidak terbacanya beberapa akun MAK (Mata Anggaran Kumulatif) pada persedian dan asset karena proses peralihan dari kas basis ke akrual basis. Dengan demikian akan memperlambat kerja dalam pembuatan laporan keuangan jika harus melakukan rekon ulang. Semenjak menggunakan aplikasi SAIBA dalam membuat laporan keuangan PSTA LAPAN harus membuat laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Padahal sebelum menggunakan aplikasi SAIBA PSTA LAPAN hanya

membuat laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan saja.

Berdasarkan hal diatas maka penulis laporan kerja praktek ini mengambil judul "Tinjauan Atas Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual di Sub Bagian Tata Usaha Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer LAPAN Bandung".

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan dilaksanakannya kerja praktek ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur sistem akuntansi instansi berbasis akrual pada PSTA LAPAN Bandung
2. Untuk mengetahui kendala apa saja di dalam prosedur sistem akuntansi instansi berbasis akrual pada PSTA LAPAN Bandung
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan atas kendala yang terjadi mengenai prosedur sistem akuntansi instansi berbasis akrual pada PSTA LAPAN Bandung

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Adapun kegunaan dari dilaksanakannya kerja praktek ini adalah :

1.3.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil dari laporan ini dapat memberi informasi dan masukan sebagai kebijakan dalam pengambilan keputusan mengenai prosedur sistem akuntansi instansi berbasis akrual di LAPAN Bandung.

1.3.2 Kegunaan Akademis

Diharapkan hasil dari laporan ini dapat menambah wawasan dan memberikan ilmu tentang akuntansi keuangan yaitu dengan pemahaman mengenai SAIBA di LAPAN Bandung.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek bertempat di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Deputi Sains, Pengkajian, dan Informasi Kedirgantaraan bagian Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer yang berlokasi di Jalan DR.Djundjunan No. 133 Bandung.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Waktu pelaksanaan kuliah kerja praktek (KKP) ini dilaksanakan selama 25 hari sesuai dengan aturan yang ada di UNIKOM dan telah disepakati oleh LAPAN tanggal 27 Juli sampai dengan 28 Agustus 2015. Waktu kerja praktek adalah hari senin sampai dengan jum’at dari pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Tabel 1.1

Pelaksanaan Kerja Praktek

Tahap	Prosedur	Bulan																											
		Juni 2015				Juli 2015				Agst 2015				Sept 2015				Okt 2015				Nov 2015				Des 2015			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I	**Tahap Persiapan**																												
	a. Mengambil surat izin KP		■																										
	b. Mencari tempat kerja KP		■	■																									
	c. Menentukan tempat KP				■	■																							
II	**Tahap Pelaksanaan**																												
	a. Mengajukan surat permohonan KP							■																					
	b. Meminta surat pengantar ke perusahaan							■	■																				
	c. KP di perusahaan								■	■	■	■	■	■															
	d. Penyusunan laporan KP													■	■	■													
III	**Tahap Pelaporan**																												
	a. Menyiapkan laporan KP															■													
	b. Bimbingan KP															■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	c. Penyempurnaan laporan KP																							■	■				
	d. Sidang laporan KP																								■	■	■		